

Framing Media Pemberitaan Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif HAM Di Majalah Tempo.Co

Puji Laksono¹ M. Rohmad Hidayat²
Univerisitas KH Abdul Chalim Mojokerto
Puji@uac.ac.id

Kata kunci:

Framing Media,
Pengungsi
Rohingya,
Tempo.co

Abstract

The humanitarian tragedy experienced by Rohingya refugees has been in the international spotlight, including in Indonesia. This study aims to analyze how media framing is applied in the coverage of Rohingya refugees in the December 18, 2023, to January 14, 2024, edition of Tempo.co magazine, focusing on the perspective of human rights. Qualitative methods and Robert N. Entman's framing analysis model were used to explore how the news formed public perceptions and opinions related to the refugee issue. The results showed that each news story not only conveyed information but also played a role in shaping opinions and influencing policies. The first news story criticized the Indonesian government's inability to handle refugees and proposed policy adjustments. The second highlighted the plight of refugees and the importance of international aid and cooperation. The third story looks at the Acehese community's rejection and the students' anarchic actions, and proposes further education and protection. The fourth story focused on the government's efforts to provide proper shelter. This research confirms the role of the media in shaping public perceptions and encouraging policy change regarding Rohingya refugees.

Abstrak

Tragedi kemanusiaan yang dialami pengungsi Rohingya telah menjadi sorotan internasional, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing media diterapkan dalam pemberitaan tentang pengungsi Rohingya di majalah Tempo.co edisi 18 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024, dengan fokus pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode kualitatif dan analisis framing Model Robert N. Entman digunakan untuk menggali bagaimana pemberitaan tersebut membentuk persepsi publik dan opini terkait isu pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini dan mempengaruhi kebijakan. Berita pertama mengkritik ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi dan mengusulkan penyesuaian kebijakan. Berita kedua menyoroti penderitaan pengungsi serta pentingnya bantuan dan kerja sama internasional. Berita ketiga mencermati penolakan masyarakat Aceh dan tindakan anarkis mahasiswa, serta mengusulkan edukasi dan perlindungan lebih lanjut. Berita keempat fokus pada upaya pemerintah menyediakan tempat penampungan yang layak. Penelitian ini menegaskan peran media dalam membentuk persepsi publik dan mendorong perubahan kebijakan terkait pengungsi Rohingya.

Keywords:

Media Framing,
Rohingya
Refugees,
Tempo.co

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu isu global yang terus menarik perhatian dunia, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok yang rentan seperti pengungsi. Pengungsi Rohingya, sebagai kelompok yang mengalami persekusi dan pengusiran dari Myanmar, merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang telah menarik perhatian masyarakat internasional. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyuarakan isu HAM, termasuk melalui berita-berita yang mereka publikasikan (Laksono, 2019). Kelompok Rohingya merupakan komunitas etnis Muslim yang telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Mereka merupakan kelompok minoritas karena mayoritas penduduk Myanmar menganut agama Buddha. Selama berada di Myanmar, populasi Muslim Rohingya mencapai jumlah terbesar di negara tersebut, mencapai sekitar satu juta jiwa pada awal tahun 2017. Mayoritas dari mereka tinggal di negara bagian Rakhine (astj, 2023).

Sementara itu, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa komunitas Rohingya merupakan imigran gelap dari Bangladesh yang tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah menolak untuk mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, mengakibatkan mereka tidak memiliki akses kepada pelayanan dasar seperti perawatan medis dan pendidikan (Laksono, 2023). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia. Peristiwa tersebut memicu timbulnya pemberontakan dan resistensi yang berujung pada perlakuan kekerasan, termasuk tindakan pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal oleh komunitas Rohingya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Akibat perlakuan diskriminatif yang mereka alami, banyak dari etnis Rohingya memilih untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga (Auli, 2023).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau *Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa* untuk *Pengungsi* mengungkapkan keprihatinan terkait insiden serangan massal yang menimpa pengungsi Rohingya di Gedung BMA, Banda Aceh, dalam beberapa waktu yang lalu. UNHCR menegaskan bahwa kekerasan yang dialami oleh pencari suaka tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa yang terjadi secara terisolasi (Nurhadi, 2023). Pengungsi rohingya di Indonesia mencapai 1.478 Orang, untuk sementara waktu pengungsi kelompok rohingya berada di Aceh, Medan hingga Pekanbaru. Akan tetapi kelompok rohingya lebih banyak mengungsi di Aceh sejak pertengahan bulan November 2023 lalu (blq & dna, 2023).

Posisi Indonesia sebagai destinasi bagi pengungsi Rohingya memunculkan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadi landasan hukum internasional terkait pengungsi. Dengan demikian, secara hukum, Indonesia tidak terikat untuk menerima pengungsi Rohingya. Tetapi, Indonesia tetap bersedia menerima mereka dengan sikap terbuka, terutama atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Walaupun belum meratifikasi, tindakan ini sesuai dengan prinsip dalam konvensi yang menyarankan agar negara tujuan pengungsi tidak mengembalikan pencari suaka ke negara asal mereka. Namun demikian, penanganan isu pengungsi tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia semata (Syarifuddin & Ahwan, 2024). Diperlukan kerjasama dan dukungan dari negara-negara di sekitarnya serta organisasi internasional agar penanganan pengungsi dapat berjalan lebih optimal. Saat ini, beberapa organisasi, termasuk UNHCR dan *International Organization for Migration (IOM)*, telah terlibat dalam upaya penanganan pengungsi (Sakti, 2024).

Dengan kejadian di atas banyak media yang memanfaatkan medianya pada pemberitaan online, yang melalui portal web untuk menyebarkan informasi suatu peristiwa pengungsi kelompok rohingya. Tidak sedikit dari berbagai media yang memanfaatkan guna menyampaikan informasi dari peristiwa tersebut, seperti media online baik cetak CNN, Tempo.co, Inews, Detik.com dan lain sebagainya. Peristiwa di atas cukup menarik untuk dijadikan penelitian, peneliti ingin mengetahui bagaimana

media online memberitakan dengan sudut pandang masing-masing. Berita atau yang ditampilkan oleh media seringkali dimaknai apa adanya oleh masyarakat. Artinya, masyarakat lebih terpengaruh pada judul berita yang dimunculkan dan kesan yang disimpulkan oleh media massa dari pada menganalisis secara mendalam isi berita tersebut. Padahal dalam kenyataannya sering terjadi *misinformasi* dan *misinterpretasi* antara apa yang seharusnya disampaikan dan kenyataan yang diterima oleh pembaca (Fauzi, 2007). Menurut Reese dan Shoemaker, setiap berita yang disajikan oleh media tentunya telah di desain sesuai dengan “kepentingan” media baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, maka teks media sangat dipengaruhi oleh pekerja media secara individu, rutinitas media, organisasi media itu sendiri, institusi di luar media, dan oleh ideologi (Shoemaker & Reese, 1996). Akan tetapi penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu media yakni Tempo.co. Adapun peristiwa di atas bahwa peristiwa tersebut dapat peneliti dengan judul penelitian “Framing media tentang Isu Hak Asasi Manusia pada Pemberitaan Pengungsi Rohingya di Majalah Tempo.Co Edisi 18 Desember 2023 Sampai 14 Januari 2024”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan kondisi fisik dan kondisi sosial berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya (Bungin, 2007). Yang didalamnya terdapat serangkaian praktik penafsiran materiil atas dunia dengan serangkaian representasi atas berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi (Creswell, 2016). Menurut Sugiyono Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiono, 2021). Metode ini akan peneliti gunakan dengan judul Jurnalisme Hak Asasi Manusia: Analisis Framing tentang Pemberitaan Pengungsi Rohingya pada Media Tempo.co.

Analisis framing secara sederhana digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai

oleh media (Eriyanto, 2007). Analisis Framing menurut Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yang pertama yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau peristiwa (Kriyantono, 2024). Pada Penelitian ini peneliti memilih Analisis framing model Robert N. Entman karena memiliki empat dasar yaitu, *define problem* (Pendefinisian Masalah), *Diagnosa Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral), dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian). Pandangan atau sudut pandang inilah yang pada akhirnya menentukan fakta apa saja yang dimasukkan, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan ke mana berita tersebut dibawa (Sudiarsis dkk., 1999). Pesan tersebut dengan demikian menjadi manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang sah, objektif, alamiah, wajar, atau perlu (Imawan, 2000).

Peneliti memilih pendekatan framing karena sesuai dengan judul penelitian framing media tentang Isu Hak Asasi Manusia pada Pemberitaan Pengungsi Rohingya di Majalah Tempo.Co Edisi 18 Desember 2023 Sampai 14 Januari 2024 yang mana peneliti ingin mengetahui bagaimana media menekankan pada suatu sudut pandang tertentu dan penjolan pada satu objek dalam suatu isi berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Framing adalah proses selektif yang menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk memengaruhi pemahaman audiens, menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan berita tetapi juga membentuk persepsi dan opini publik. Analisis Robert N. Entman dalam berita yang ada di majalah Tempo sebagai berikut:

- a) Majalah Tempo.co edisi 18 - 23 Desember 2023

Tabel Analisis Framing Berita Hiprokisi Indonesia dalam Urusan Rohingya

Mendefinisikan Masalah (<i>Proben Identification</i>)	Masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Implikasinya yakni penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya muncul karena pemerintah tidak sigap dalam menangani mereka
--	---

Mendiagnosis Penyebab (<i>Casual Interpretation</i>)	Penyebab masalah ini adalah ketidakmampuan pemerintah dan sikap lepas tangan dalam menangani pengungsi. Implikasi yakni Sikap pemerintah bertentangan dengan kewajiban kemanusiaan dan status Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Memberikan Penilaian Moral (<i>Moral Evoution</i>)	Pemerintah Indonesia dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Implikasinya yakni menunjukkan sikap hipokrisi, mengingat Indonesia seharusnya mematuhi prinsip <i>non-refoulement</i> dan memiliki kewajiban kemanusiaan.
Rekomendasi Perlakuan (<i>Treatment Recommendation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyesuaian Kebijakan: Revisi dan implementasi efektif Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan aturan teknis yang jelas. 2) Dukungan Ekonomi: Alokasikan anggaran khusus untuk penanganan pengungsi di tingkat daerah. 3) Pelatihan dan Pendidikan: Berikan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah tentang penanganan pengungsi. 4) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mendorong kerjasama antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi internasional untuk menyediakan bantuan kepada pengungsi. 5) Evaluasi dan Monitoring: Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penanganan pengungsi dan pastikan adanya mekanisme monitoring yang efektif. 6) Upaya Diplomatis: Tingkatkan diplomasi internasional untuk menekan Myanmar mengakui Rohingya dan melobi negara lain agar menerima pengungsi.

b) Majalah Tempo Edisi 25-31 Desember 2023

Tabel Analisis Framing Mereka Yang Hidup Mengapung

Mendefinisikan Masalah (<i>Probem Identification</i>)	Masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Implikasinya yakni penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya muncul karena pemerintah tidak sigap dalam menangani mereka.
Mendiagnosis Penyebab (<i>Casual Interpretation</i>)	Penyebab masalah ini adalah ketidakmampuan pemerintah dan sikap lepas tangan dalam menangani pengungsi. Implikasinya yakni sikap pemerintah bertentangan dengan kewajiban kemanusiaan dan status Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Memberikan Penilaian Moral (<i>Moral Evoution</i>)	Pemerintah Indonesia dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Implikasinya yakni sikap ini menunjukkan hipokrisi, mengingat Indonesia seharusnya mematuhi prinsip <i>non-refoulement</i> dan memiliki kewajiban kemanusiaan.
Rekomendasi Perlakuan	1) Penyesuaian Kebijakan: Revisi dan implementasi

<i>(Treatment Recommendation)</i>	<p>efektif Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan aturan teknis yang jelas.</p> <p>2) Dukungan Ekonomi: Alokasikan anggaran khusus untuk penanganan pengungsi di tingkat daerah.</p> <p>3) Pelatihan dan Pendidikan: Berikan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah tentang penanganan pengungsi.</p> <p>4) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mendorong kerjasama antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi internasional untuk menyediakan bantuan kepada pengungsi.</p> <p>5) Evaluasi dan Monitoring: Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penanganan pengungsi dan pastikan adanya mekanisme monitoring yang efektif.</p> <p>6) Upaya Diplomatis: Tingkatkan diplomasi internasional untuk menekan Myanmar mengakui Rohingya dan melobi negara lain agar menerima pengungsi.</p>
-----------------------------------	---

Berdasarkan tabel di atas bahwa analisis framing menurut Robert N. Entman, berita ini menunjukkan bahwa masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Penyebabnya adalah sikap lepas tangan pemerintah, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Penilaian moral mengarah pada hipokrisi pemerintah, dan solusi yang diusulkan mencakup penyesuaian kebijakan, dukungan ekonomi, dan upaya diplomatis. Dengan framing ini, berita tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga membentuk persepsi dan opini publik tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

c) Majalah Tempo Edisi 1-7 Januari 2024

Tabel Analisis Framing Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya

Mendefinisikan Masalah <i>(Problem Identification)</i>	Masalah utama adalah tindakan pengusiran dan serangan terhadap pengungsi Rohingya oleh mahasiswa serta penolakan sebagian masyarakat Aceh terhadap keberadaan pengungsi. Implikasinya yakni pengungsi Rohingya yang sudah mengalami penderitaan di negara asal dan perjalanan sulit kembali menghadapi ancaman dan ketidakamanan di tempat pengungsian.
Mendiagnosis Penyebab <i>(Casual Interpretation)</i>	Penyebab masalah ini adalah ketidaktahuan dan prasangka negatif yang disebarkan melalui kampanye daring berisi misinformasi, disinformasi, serta ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Implikasinya yakni sikap dan tindakan anarkis mahasiswa serta penolakan masyarakat didorong oleh informasi yang tidak benar dan rasa ketidakpuasan terhadap pengelolaan pengungsi.
Memberikan Penilaian Moral	Tindakan mahasiswa dan penolakan masyarakat dinilai tidak

<i>(Moral Evoution)</i>	manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta hak asasi manusia. Implikasinya yakni ada evaluasi moral yang menyoroti pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pengungsi, serta kritik terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Rekomendasi Perlakuan <i>(Treatment Recommendation)</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan Edukasi: Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang situasi dan penderitaan pengungsi Rohingya serta pentingnya sikap kemanusiaan.2) Perlindungan Pengungsi: Memastikan perlindungan yang lebih ketat dan pengamanan tempat pengungsian untuk mencegah tindakan anarkis dan kekerasan terhadap pengungsi.3) Penyediaan Tempat Pengungsian Layak: Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menyediakan tempat pengungsian yang aman, layak, dan memiliki fasilitas memadai4) Kolaborasi Antar Daerah: Menggalang kerjasama antar daerah untuk berbagi tanggung jawab dalam menampung dan membantu pengungsi, guna mengurangi beban pada satu daerah tertentu.5) Tindakan Tegas Terhadap Kekerasan: Mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atau pengusiran terhadap pengungsi untuk memberikan efek jera dan memastikan penegakan hukum.6) Penyebaran Informasi yang Akurat: Menggalakkan penyebaran informasi yang benar melalui media dan lembaga terkait untuk melawan misinformasi dan disinformasi yang memicu kebencian dan prasangka.

Berdasarkan tabel di atas analisis framing menurut Robert N. Entman, berita ini menyoroti tindakan anarkis mahasiswa dan penolakan masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya sebagai masalah utama yang memerlukan perhatian serius. Penyebabnya adalah kampanye misinformasi yang menyebarkan kebencian dan prasangka negatif. Tindakan tersebut dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi, perlindungan pengungsi, penyediaan tempat pengungsian layak, dan kerjasama antar daerah. Dengan framing ini, berita tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga membentuk persepsi dan opini publik tentang perlakuan yang tidak adil terhadap pengungsi Rohingya serta langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi mereka.

d) Majalah Tempo Edisi 8-14 Januari 2024

Tabel Analisis Framing Pemerintah Rencanakan Tempat Penampungan Sementara bagi Pengungsi Rohingya

Mendefinisikan Masalah (<i>Problem Identification</i>)	Masalah utama adalah kebutuhan mendesak untuk tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh dan lokasi lain di Indonesia. Implikasinya yakni pengungsi Rohingya menghadapi ketidakpastian dan kesulitan karena tidak memiliki tempat penampungan yang layak, yang memperburuk kondisi mereka setelah melarikan diri dari konflik di Myanmar.
Mendiagnosis Penyebab (<i>Casual Interpretation</i>)	Penyebab masalah ini adalah konflik berkepanjangan di Myanmar yang menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan tempat penampungan yang memadai untuk mengakomodasi jumlah pengungsi yang terus bertambah. Implikasinya yakni konflik di Myanmar mendorong arus pengungsi yang tidak terputus, sementara pemerintah Indonesia harus menghadapi beban tambahan dalam mengatur penampungan dan memastikan kondisi yang layak bagi pengungsi.
Memberikan Penilaian Moral (<i>Moral Evoution</i>)	Tindakan pemerintah untuk mencari tempat penampungan sementara dianggap sebagai langkah positif dan menunjukkan tanggung jawab kemanusiaan. Evaluasi moral berfokus pada pentingnya memberikan perlindungan dan tempat yang aman bagi pengungsi Rohingya. Implikasinya yakni penilaian moral menekankan perlunya dukungan dan tanggung jawab kemanusiaan dalam menangani situasi pengungsi, serta penghargaan terhadap upaya pemerintah untuk merespons kebutuhan mendesak ini.
Rekomendasi Perlakuan (<i>Treatment Recommendation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Tempat Penampungan: Memastikan bahwa lokasi yang diusulkan untuk penampungan, seperti Berah Blang Ado dan Kamp Pramuka Seulawah, memiliki fasilitas yang memadai dan aman untuk pengungsi Rohingya. 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan proses penampungan dan memastikan adanya dukungan lokal yang memadai. 3) Pengelolaan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung kebutuhan pengungsi, termasuk makanan, kesehatan, dan perlindungan. 4) Transparansi dan Komunikasi: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada publik tentang upaya pemerintah dalam menangani penampungan pengungsi dan mengatasi kekhawatiran masyarakat. 5) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi pengungsi di tempat penampungan untuk memastikan standar yang layak dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan.

Berdasarkan tabel di atas bahwa analisis framing menurut Robert N. Entman, berita ini menyoroti upaya pemerintah untuk mencarikan tempat penampungan sementara sebagai solusi terhadap kebutuhan mendesak pengungsi Rohingya. Masalah utama adalah kekurangan tempat penampungan yang layak, yang disebabkan oleh arus pengungsi yang meningkat akibat konflik di Myanmar. Evaluasi moral menilai tindakan pemerintah sebagai respons kemanusiaan yang positif, sementara solusi yang diusulkan berfokus pada penyediaan fasilitas yang aman dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Framing ini mengarahkan perhatian publik pada upaya konkret pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

Dalam edisi 18 Desember 2023 hingga 24 Januari 2024, Majalah Tempo menyajikan laporan mendalam mengenai krisis pengungsi Rohingya, mengangkat berbagai sudut pandang terkait masalah ini. Berita-berita tersebut mengeksplorasi tantangan Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, mengkritik respons pemerintah yang dianggap lamban, serta melaporkan insiden pengusiran yang memicu kecaman. Dengan melibatkan berbagai perspektif, Majalah Tempo memberikan analisis komprehensif tentang dinamika dan urgensi krisis kemanusiaan ini. Berikut merupakan gabungan dari empat berita yang telah dianalisis pada bagian penelitian ini untuk diambil kesimpulan lebih mendalam lagi:

**Tabel Analisis Framing edisi 18 Desember 2023 hingga 24 Januari 2024,
Majalah Tempo**

Mendefinisikan Masalah (<i>Problem Identification</i>)	Dalam empat berita menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan penampungan yang layak dan memastikan keselamatan pengungsi, serta adanya penolakan dari sebagian warga Aceh. Insiden kekerasan terhadap pengungsi juga diidentifikasi sebagai bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu kurangnya tanggung jawab dari pemerintah.
Mendiagnosis Penyebab (<i>Casual Interpretation</i>)	Penyebab masalah dalam empat berita ini diinterpretasikan sebagai kurangnya tanggapan yang sigap dari pihak pemerintah Indonesia, termasuk sikap tidak peduli terhadap kewajiban internasional meskipun negara ini adalah anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, faktor ketidakmampuan daerah untuk menangani masalah ini sendiri, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga

	internasional seperti UNHCR, disebut sebagai penyebab tambahan. nyebab masalah ini adalah konflik berkepanjangan di Myanmar yang menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan tempat penampungan yang memadai untuk mengakomodasi jumlah pengungsi yang terus bertambah. Implikasinya yakni konflik di Myanmar mendorong arus pengungsi yang tidak terputus, sementara pemerintah Indonesia harus menghadapi beban tambahan dalam mengatur penampungan dan memastikan kondisi yang layak bagi pengungsi.
Memberikan Penilaian Moral (<i>Moral Evoution</i>)	Dalam 4 berita ini cenderung negatif terhadap sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai hipokrit, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan komitmen hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Insiden pengusiran dan kekerasan terhadap pengungsi oleh mahasiswa juga mendapat kecaman sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima.
Rekomendasi Perlakuan (<i>Treatment Recommendation</i>)	Rekomendasi perlakuan yang diusulkan adalah agar pemerintah Indonesia lebih proaktif dalam menangani masalah pengungsi, termasuk mencari solusi penampungan yang aman dan layak, serta meningkatkan koordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR. Pemerintah juga diharapkan untuk menghormati prinsip non-refoulement dan memperbaiki peraturan serta implementasinya terkait penanganan pengungsi. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh misinformasi dan disinformasi yang dapat memicu kebencian terhadap pengungsi.

Berdasarkan tabel di atas bahwa majalah Tempo menyoroti ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan penampungan yang layak dan menjamin keselamatan pengungsi Rohingya sebagai masalah utama, diperburuk oleh penolakan sebagian warga Aceh dan kekerasan terhadap pengungsi. Penyebab utama diidentifikasi sebagai kurangnya respons pemerintah dan ketidakpedulian terhadap kewajiban internasional, serta ketidakmampuan daerah dan kurangnya koordinasi dengan lembaga internasional. Penilaian moral Majalah Tempo mengkritik sikap pemerintah sebagai hipokrit dan tindakan kekerasan terhadap pengungsi sebagai tidak manusiawi. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan proaktivitas pemerintah, pencarian solusi penampungan yang aman, dan perbaikan koordinasi dengan UNHCR serta masyarakat agar tidak terpengaruh oleh misinformasi.

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam analisis framing menurut Robert N. Entman, berita ini menunjukkan bahwa masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Penyebabnya adalah sikap lepas tangan pemerintah, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Penilaian moral mengarah pada hipokrisi pemerintah, dan solusi yang diusulkan mencakup penyesuaian kebijakan, dukungan ekonomi, dan upaya diplomatis. Dengan framing ini, berita tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga membentuk persepsi dan opini publik tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

PEMBAHASAN

Jurnalisme Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan praktik jurnalistik yang berfokus pada pelaporan isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia, dengan tujuan untuk mengangkat eksistensi manusia dan mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Tujuan utama jurnalisme HAM adalah mengungkap pelanggaran hak asasi, memberikan suara kepada mereka yang tidak terdengar, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, serta mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu HAM. Prinsip-prinsip yang mendasari jurnalisme HAM mencakup universalitas dan ketidakdapatdibacukan hak-hak, saling keterkaitan dan ketidakmampuan untuk dibagi, partisipasi dan inklusi, akuntabilitas dan supremasi hukum, serta kesetaraan dan antidiskriminasi. Peliputan dalam jurnalisme HAM harus selalu mengutamakan nilai kemanusiaan, menghormati martabat individu, serta mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik untuk memastikan pelaporan yang akurat, objektif, dan beretika. Fokus utama dalam jurnalisme HAM adalah mengungkap kebenaran dan keadilan, dengan menekankan pelaporan yang berimbang dan mendalam mengenai isu-isu HAM(Sofyan dkk., 2020). Profesionalisme wartawan dalam bidang ini mencakup pemahaman kelayakan berita dan format penyajiannya sesuai dengan kebijakan redaksional, serta keseimbangan antara tuntutan media dan komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM. Selain itu, keterampilan pelaporan yang mendalam dan komprehensif tentang isu-isu HAM

sangat penting. Indikator dalam jurnalisme HAM mencakup seberapa sering dan mendalam isu-isu HAM diliput oleh media, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan antidiskriminasi, serta dampak pelaporan terhadap kebijakan publik dan kesadaran masyarakat. Poin penting lainnya adalah tingkat partisipasi dan representasi suara korban atau kelompok rentan dalam pelaporan serta akurasi, objektivitas, dan etika dalam meliput isu-isu tersebut (Faizal & Laksono, 2021).

Pada edisi majalah Tempo.co antara Desember 2023 dan Januari 2024, dua artikel yang terkait dengan pengungsi Rohingya membahas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Artikel pertama, berjudul "Hiprokisi Indonesia dalam Urusan Rohingya", mengungkap ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Berita ini mengedepankan hak universal yang harus dihormati oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup hak pengungsi untuk hidup aman dan memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Artikel ini juga menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh pengungsi Rohingya yang kehilangan kewarganegaraannya akibat penindasan junta militer Myanmar, serta pentingnya prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Dalam pemberitaan ini, Tempo.co secara inklusif memberikan platform bagi pengungsi untuk berbicara tentang penderitaan mereka, serta menekankan perlunya kebijakan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan standar internasional.

Artikel kedua, "Mereka yang Hidup Mengapung", menggali kondisi memprihatinkan pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai negara, dengan fokus pada kisah-kisah individu seperti Yasmin, Sahat Zia Hero, dan Sanaullah. Berita ini mengungkap pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para pengungsi, termasuk penahanan yang tidak sah, perdagangan manusia, serta diskriminasi yang mereka hadapi. Artikel ini tidak hanya menyoroti dampak langsung dari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi sebagai upaya mendokumentasikan bukti yang dapat digunakan untuk akuntabilitas dan tindakan lebih lanjut. Melalui jurnalisme HAM, pemberitaan ini bertujuan untuk memberikan suara kepada korban, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi

kehidupan pengungsi Rohingya. Dengan demikian, pemberitaan ini tidak hanya mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan, tetapi juga mendukung pemahaman yang lebih dalam mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi.

Berita berjudul "Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya" yang dimuat di majalah Tempo.co edisi 1-7 Januari menggambarkan penerapan jurnalisme hak asasi manusia (HAM) yang efektif. Artikel ini berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai kekerasan dan penolakan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, dengan mengungkapkan tindakan mahasiswa yang mengusir mereka. Selain itu, berita ini memberikan suara kepada pengungsi, menampilkan penderitaan yang mereka alami akibat kekerasan dan penolakan yang terus-menerus. Lebih jauh lagi, artikel ini mendorong tindakan perlindungan dengan mencatat kecaman dari Komnas HAM dan UNHCR, serta mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi sebagai bukti untuk akuntabilitas dan reformasi. Dalam konteks ini, pemberitaan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam, mendorong kebijakan yang lebih adil, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip jurnalisme HAM, berita ini mencerminkan beberapa prinsip penting. Pertama, prinsip universal dan tak dapat dicabut, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia pengungsi Rohingya harus dihormati tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam pemberitaan ini mengenai pelanggaran hak yang mereka alami. Kedua, prinsip saling terkait dan tidak dapat dibagi, yang menunjukkan bagaimana berbagai pelanggaran—termasuk kekerasan, penolakan, dan ketidakamanan—terhubung erat, menciptakan kondisi yang sulit bagi pengungsi. Ketiga, prinsip partisipasi dan inklusi, yang tercermin dari penyajian pengalaman pengungsi Rohingya dan memberikan mereka platform untuk bersuara dalam diskusi publik tentang hak asasi manusia. Keempat, prinsip akuntabilitas dan rule of law, yang tercermin dalam kecaman yang dilontarkan oleh Komnas HAM dan UNHCR, mendesak perlindungan dan tempat tinggal yang aman bagi pengungsi, dan menegaskan pentingnya identifikasi pihak yang bertanggung jawab serta penegakan hukum. Kelima, prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi, yang terlihat jelas dalam

pemberitaan ini, menyoroti diskriminasi dan penolakan yang dihadapi pengungsi, sekaligus menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Selain itu, berita ini juga mengedepankan prinsip mengungkap kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, pemberitaan ini memprioritaskan kemanusiaan dengan mengungkapkan penderitaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya serta kekerasan yang mereka alami. Berita ini juga tampaknya mengikuti UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dengan menyajikan fakta secara objektif dan adil, serta memberikan informasi yang relevan tanpa adanya bias. Selanjutnya, dengan mengungkapkan kebenaran tentang kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi pengungsi, serta tindakan mahasiswa yang melanggar hak mereka, berita ini berkontribusi pada pencapaian keadilan bagi korban. Terkait dengan penampungan pengungsi Rohingya, meskipun berita ini tidak secara langsung mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia, artikel ini tetap memberikan konteks mengenai krisis pengungsi yang timbul akibat konflik di Myanmar dan menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan solusi yang layak. Dengan memaparkan rencana penampungan dan data jumlah pengungsi, berita ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran publik, mempromosikan keadilan, serta memperjuangkan perlakuan yang layak bagi pengungsi, sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Berita ini juga menggambarkan prinsip-prinsip jurnalisme HAM lainnya. Pertama, prinsip universal dan tak dapat dicabut, yang tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan hak pengungsi Rohingya terlindungi dengan mencari tempat penampungan yang layak. Kedua, prinsip saling terkait dan tidak dapat dibagi, yang menyoroti bagaimana masalah penampungan pengungsi terkait erat dengan konflik berkepanjangan di Myanmar. Ketiga, prinsip partisipasi dan inklusi, yang terlihat dari upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, dalam mencari solusi penampungan yang layak dan aman. Keempat, prinsip akuntabilitas dan rule of law, yang ditegaskan dengan menyebutkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan tempat penampungan yang aman dan sesuai

dengan hukum yang berlaku. Kelima, prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi, yang terlihat dari upaya pemerintah untuk memastikan perlakuan yang adil bagi pengungsi Rohingya, serta memberikan tempat tinggal yang layak tanpa diskriminasi. Pemberitaan ini juga menunjukkan prinsip mengungkap kebenaran dan keadilan, dengan memprioritaskan kemanusiaan, mengungkap perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar pengungsi Rohingya, seperti tempat tinggal yang aman dan layak. Berita ini tampaknya mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dengan menyajikan informasi yang jelas, objektif, dan tidak bias. Selain itu, pemberitaan ini mengungkapkan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam mencari tempat penampungan bagi pengungsi, yang mencerminkan upaya untuk memastikan keadilan bagi mereka dengan menyediakan tempat tinggal yang layak.

Majalah *Tempo* edisi Desember 2023 hingga Januari 2024 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik jurnalisme Hak Asasi Manusia (HAM) melalui berbagai pendekatan dalam mengungkapkan pelanggaran HAM serta mempromosikan keadilan. Berita *Hipokrisi Indonesia Dalam Urusan Rohingya* menyoroti ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban HAM terhadap pengungsi Rohingya, dengan memberikan penekanan pada hak universal yang harus dihormati dan mengkritisi ketidakadilan dalam sistem hukum serta penolakan terhadap pengungsi di Aceh. Artikel ini menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme HAM seperti universalisme, inklusi, dan akuntabilitas untuk mengekspos pelanggaran dan mendorong reformasi. Sementara itu, artikel *Mereka Yang Hidup Mengapung* berfokus pada kondisi memprihatinkan pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai negara, menggambarkan pelanggaran HAM melalui kisah-kisah individu seperti Yasmin dan Sanaullah, serta menunjukkan hubungan antara berbagai hak yang dilanggar dan diskriminasi yang dialami. Berita ini mengutamakan kemanusiaan dan keadilan dengan menampilkan bukti-bukti pelanggaran dan meningkatkan kesadaran publik. Artikel *Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya* menggambarkan tindakan kekerasan yang dialami oleh pengungsi di Aceh dan menekankan pentingnya inklusi, akuntabilitas, serta kesetaraan, dengan mendorong perlindungan yang lebih tegas dari lembaga-

lembaga seperti Komnas HAM dan UNHCR. Terakhir, artikel *Penampungan Pengungsi Rohingya* memberikan gambaran mengenai usaha pemerintah dalam menyediakan solusi penampungan yang layak, dengan menekankan prinsip-prinsip universalitas, partisipasi, dan akuntabilitas, serta menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak pengungsi secara adil. Secara keseluruhan, setiap artikel menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme HAM dengan pendekatan yang berbeda untuk mengungkapkan pelanggaran, mempromosikan keadilan, serta meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas terkait isu pengungsi Rohingya.

Tujuan jurnalisme HAM dalam berita-berita tersebut berfungsi untuk mengungkapkan pelanggaran HAM dan mendorong keadilan. Artikel *Hipokrisi Indonesia Dalam Urusan Rohingya* dan *Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya* lebih menekankan kritik terhadap pihak-pihak yang gagal memenuhi kewajiban HAM, sedangkan artikel *Mereka Yang Hidup Mengapung* dan *Penampungan Pengungsi Rohingya* lebih fokus pada kondisi pengungsi dan upaya-upaya perlindungan yang dilakukan. Prinsip-prinsip jurnalisme HAM diterapkan secara konsisten, meskipun dengan fokus yang berbeda pada masing-masing artikel. Misalnya, *Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya* dan *Mereka Yang Hidup Mengapung* lebih menyoroti pelanggaran hak individu, sementara *Penampungan Pengungsi Rohingya* lebih mengedepankan upaya pemerintah dalam memenuhi hak pengungsi. Kewajiban jurnalisme HAM juga dijunjung tinggi dalam semua artikel ini, yang memprioritaskan kemanusiaan serta mengikuti prinsip-prinsip UU Pers dan kode etik jurnalistik. Artikel *Penampungan Pengungsi Rohingya* menunjukkan upaya positif dari pemerintah, sementara artikel lainnya lebih fokus pada pelanggaran yang terjadi serta kebutuhan mendesak untuk reformasi.

Secara keseluruhan, laporan-laporan yang dimuat dalam majalah *Tempo* edisi Desember 2023 hingga Januari 2024 mencerminkan upaya jurnalisme HAM yang mendalam dan komprehensif, dengan fokus utama pada krisis pengungsi Rohingya. Artikel-artikel ini menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pengungsi, mulai dari ketidakadilan yang mereka hadapi di Aceh hingga diskriminasi yang mereka alami di negara-negara lain. Melalui penerapan prinsip-prinsip jurnalisme

HAM, seperti universalisme hak asasi manusia yang tak dapat dicabut, keterkaitan antar hak, partisipasi inklusif, akuntabilitas terhadap pelanggaran, dan kesetaraan tanpa diskriminasi, setiap artikel berusaha mengungkapkan kebenaran secara objektif dan beretika. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, laporan-laporan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kemanusiaan, memberikan dampak positif terhadap kebijakan publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi pengungsi Rohingya. Dengan menyoroti penderitaan dan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi, laporan-laporan ini mendorong tindakan yang lebih adil dan responsif dari berbagai pihak, serta berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai peran media massa dalam jurnalisme hak asasi manusia, dengan fokus pada majalah *TEMPO.CO*. Pertama, *TEMPO.CO* berperan signifikan dalam mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam laporan mengenai pengungsi Rohingya. Majalah ini tidak hanya melaporkan ketidakadilan yang dialami pengungsi, tetapi juga mengkritik kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia. Melalui pemberitaan yang empatik, *TEMPO.CO* berhasil membangkitkan kesadaran publik dan mendorong dialog serta aksi kolektif untuk mendukung kelompok rentan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang diterapkan dalam pemberitaan tentang pengungsi Rohingya memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Penyajian berita yang tepat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial mengenai isu kemanusiaan, serta mendorong tindakan kolektif yang lebih positif. Framing ini juga memperlihatkan bagaimana media dapat menjadi agen perubahan sosial yang aktif. Terakhir, penelitian ini mengungkapkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran sosial, dan

mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi, terutama terkait hak asasi manusia.

Sumbangsih penelitian ini terhadap ilmu komunikasi dan jurnalisme terletak pada pemahaman lebih dalam mengenai peran media massa dalam jurnalisme hak asasi manusia, khususnya dalam konteks framing media dan dampaknya terhadap opini publik. Penelitian ini juga menambah wawasan tentang bagaimana media dapat menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif, yang mendorong kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ruang lingkup yang terbatas pada satu majalah, yaitu *TEMPO.CO*, serta pada periode waktu tertentu (Desember 2023 hingga Januari 2024). Oleh karena itu, temuan ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika media lainnya dalam mengangkat isu serupa atau perkembangan jangka panjang terkait isu pengungsi Rohingya. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini ke dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astj. (2023). Asal-usul Rohingya dan Alasan Mereka Mengungsi. *detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi>.
- Auli, S. H. R. C. (2023). Apakah Indonesia Wajib Melindungi Pengungsi Rohingya? *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-rohingya-lt6571bcf11ec52>.
- blq, & dna. (2023). Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia? *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231213072545-106-1036553/kenapa-banyak-pengungsi-rohingya-lari-ke-indonesia>.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (hlm. 105). Kencana Jakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.

- Faizal, M., & Laksono, P. (2021). ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN SEMIOTIKA ENDORSER PRODUK MUSLIMAH DI INSTAGRAM. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 6(1), 12–32. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v6i1.855>
- Fauzi, A. C. (2007). *Kabar-Kabar Kekerasan dari Bali*. LKIS.
- Imawan, T. (2000). *Media Surabaya Menguburkan Makna* (09 ed.). Pantau.
- Kriyantono, R. (2024). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Jakarta.
- Laksono, P. (2019). Kuasa media dalam komunikasi massa. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 4(2), 49–61.
- Laksono, P. (2023). Risalah Teori-Teori Komunikasi Massa. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 8(1), 1–12.
- Nurhadi. (2023). Menangani Masalah Pengungsi, Sejak Kapan UNHCR Beroperasi di Indonesia? *dunia.tempo.co*. <https://dunia.tempo.co/read/1815446/menangani-masalah-pengungsi-sejak-kapan-unhcr-beroperasi-di-indonesia>
- Sakti, R. E. (2024). Rohingya dan Komitmen Indonesia Lindungi Pengungsi Dunia. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/30/rohingya-dan-komitmen-indonesia-lindungi-pengungsi-dunia>.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*.
- Sofyan, A., Laksono, P., & Chabibi, M. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ULAMA NAHDLATUL WATHAN PANCOR DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019. *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v5i2.965>
- Sudiarsis, F., Nugroho, B., & Eriyanto. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Institut Studi Arus informasi.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (hlm. 17). Alfabeta.
- Syaifuddin, M., & Ahwan, Z. (2024). Communication Analysis in Bullying Prevention in Islamic Boarding Schools in Pasuruan Regency. *Communicator: Journal of Communication*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59373/comm.v1i2.49>